

## **SEJARAH SINGKAT**

### **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG**

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Yaitu Jabatan Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan *Tuorism* Atau Perpelancongan. Pemerintah Pusat Dalam Mengantur Kepariwisata Di Seluruh Indonesia Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 Yang Berisi Tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional. Lembaga Ini Mempunyai Tugas Utama Yaitu Membantu Presiden Dalam Menetapkan Kebijakan Umum Di Bidang Kepariwisata Nasional. Di Dalam Keputusan Ini Dicantumkan Pula Tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pariwisata Dalam Suatu Struktur Organisasi Departemen Perhubungan.

Pada Tahun 1969, Pemerintah Mengeluarkan Intruksi Presiden No. 9 /1969 Yang Berisi Tentang Pembentukan Badan Pariwisata Nasional (BAPARNAS) Dalam Rangka Untuk Menjamin Pembinaan Dan Pembangunan Yang Efektif Dan Berlanjut Dalam Pelaksanaan Yang Diusahakan Oleh Pihak Pemerintah Dan Swasta. BAPARNAS Bertugas Untuk Membantu Menteri Perhubungan Dan Dirjen Pariwisata.

Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK. 71/ 11/ 1969, Dibentuklah Dinas Pariwisata Di Tingkat Daerah (Dinas Pariwisata Daerah/ DISPARDA). Kemudian Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat Membentuk Dinas Pariwisata Tingkat I Jawa Barat, Setelah Itu Dibentuklah Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah No. II/ 1969. Pada Tahun 1971 Sampai Dengan 1987 Tercatat Dengan Nama Kantor Pariwisata Daerah (KAPARDA).

Sejak Keluarnya Peraturan Daerah No. II/ 1985 Tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Maka Sejak Tahun 1987 KAPARDA Diganti Menjadi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Sejalan Dengan Adanya Otonomi Daerah Indonesia, Seluruh Tingkat Pemerintahan Di Indonesia Baik Di Pusat, Propinsi, Maupun Kota Dan Kabupaten Mengalami Beberapa Perubahan. Berdasarkan UU No. 22/ 1999, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Kotamadya Mengalami Perubahan

Menjadi Dinas Pariwisata Kota Bandung Dan Mendapatkan Penambahan Kewenangan Yang Lebih Luas Terhadap Urusan Biro Perjalanan Dan Hotel Berbintang.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Di Atas, Dalam Upaya Memenuhi Kewenangan Yang Diberikan Berdasarkan UU No. 22/ 1999 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandung Pun Mengalami Beberapa Perubahan Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tanggal 7 Maret 2001 Mengenai Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandung. Kemudian Pada Tanggal 4 Desember 2007 Melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Dinas Pariwisata Daerah Kota Bandung Dirubah Lagi Menjadi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Sampai Sekarang.